



LAPORAN TAHUNAN 2013

**MEMPERKUAT PERAN & POSISI PEREMPUAN
UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA
KEADILAN, DEMOKRASI & PERDAMAIAN**



**KOALISI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK
KEADILAN DAN DEMOKRASI**

2014

LAPORAN TAHUNAN 2013

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

UNTUK KEADILAN DAN DEMOKRASI

MEMPERKUAT

PERAN & POSISI PEREMPUAN

UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA

KEADILAN, DEMOKRASI & PERDAMAIAN



PERIODE

JANUARI-DESEMBER 2013

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi
Jl. Siaga 1 No.2B, Pejaten Barat - Pasar Minggu, Jakarta Selatan -12510
Telp: (021) 79183221, 79183444, Fax : (021) 79183444

Email : sekretariat@koalisiperempuan.or.id

Website: www.koalisiperempuan.or.id

DAFTAR ISI

NO	BAB/SUB BAB	HAL
1	PENGANTAR	3
2	BAB I. ANALISIS SITUASI	4
3	1. Analisis Situasi di Tingkat Daerah	4
4	2. Analisis Situasi di Tingkat Nasional	5
5	3. Analisis Situasi di Tingkat Internasional	9
6	BAB II. RESPON KOALISI TERHADAP SITUASI & PELAKSANAAN PROGRAM	10
7	1. Reformasi Kebijakan Publik	10
8	2. Penguatan Organisasi dan Anggota	16
9	3. Dukungan Program	20
10	4. Dukungan Kelembagaan	22
11	BAB III. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM	23

PENGANTAR

Pada tahun 2013 ini, Koalisi Perempuan Indonesia genap berusia 15 tahun. Usia yang masih sangat muda bagi sebuah organisasi perempuan berbasis anggota dengan struktur organisasi dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

Sebagai organisasi perempuan yang menggunakan strategi advokasi kebijakan public dan pengorganisasian kelompok perempuan untuk memperkuat peran dan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat, Koalisi Perempuan Indonesia masih dihadapkan pada berbagai rintangan kultural. Meski secara politik prinsip kesetaraan dan keadilan gender telah diterima dalam hukum dan administrasi di Indonesia, namun penolakan dari individu maupun kelompok masih terus bergulir dan menguat. Kelompok-kelompok penentang kesetaraan dan keadilan gender pun akhirnya menyebut Koalisi Perempuan Indonesia sebagai organisasi radikal yang akan mengganti budaya lokal dengan budaya barat.

Sejarah kelim gerakan perempuan yang mengalami penghancuran di tahun 60an, masih melekat diingatan masyarakat. Sejarah kelim ini pula lah yang digunakan oleh sebagian masyarakat untuk memberikan label negatif kepada organisasi perempuan yang kritis terhadap kebijakan dan tata nilai yang tidak adil gender, seperti Koalisi Perempuan Indonesia.

Di tengah tantangan dari berbagai pihak eksternal dan keterbatasan di tingkat internal, Koalisi Perempuan Indonesia tetap berupaya memberikan sumbangan untuk memperkuat peran dan kedudukan perempuan untuk mewujudkan keadilan gender, demokrasi dan perdamaian, sebagaimana disampaikan dalam laporan tahunan tahun 2013 ini.

Jakarta, Februari 2014

Dian Kartikasari, SH

Sekretaris Jenderal

BAB I ANALISIS SITUASI

1. Analisis Situasi di Tingkat Daerah

Sejak diterapkannya Undang-undang Pemerintahan Daerah, pada tahun 2001, yang memberikan Kewenangan otonom kepada Daerah, harapan untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi, semakin besar. Namun pelaksanaan Otonomi Daerah, bagai belati bermata dua. Pada satu sisi memberikan harapan untuk peningkatan kesejahteraan, disisi lain melahirkan raja-raja kecil yang otoriter dan diskriminatif yang mengancam berlanjutnya demokrasi.

Sejumlah daerah menunjukkan peningkatan kesejahteraan dan demokrasi, seperti adanya Kota/Kabupaten yang berhasil menurunkan kemiskinan secara *signifikan*, Kota/kabupaten ramah lingkungan, Kota/kabupaten ramah anak dan Kota/kabupaten yang berhasil mencapai target-target *Millennium Development Goal*.

Di sisi lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan kepada publik bahwa sejak berlakunya Otonomi Daerah hingga Januari 2014, terdapat 318 dari 524 Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan sebagai tersangka dalam kasus korupsi.

Sepanjang tahun 2013 telah terjadi 253 konflik, mencakup 153 kasus konflik agraria dan 85 kasus konflik sosial berbasis agama, dan suku/ras. Pimpinan daerah dan aparat keamanan dinilai lamban dalam *mendeteks*, mencegah dan menghentikan konflik. Keterlambatan penanganan konflik ini mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 2013 tentang Penanganan Konflik. Berbagai peristiwa konflik tersebut menempatkan perempuan dan anak dalam situasi paling rentan terhadap berbagai tindak kekerasan. Disamping itu, konflik mengakibatkan kemiskinan serta menimbulkan trauma bagi perempuan dan laki-laki di segala lapisan usia

Selama tahun 2013 terdapat lebih dari 30 kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama dan berkeyakinan yang melibatkan pejabat/*apparatus* Negara dan 54 Perda yang diskriminatif terhadap perempuan, yang berisi larangan bagi

perempuan keluar malam, dan Perda etika berbusana. Selain beberapa Peraturan Daerah yang diputuskan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terdapat pula produk hukum yang diterbitkan oleh Kepala Daerah yang diskriminatif terhadap perempuan, antara lain Etika berbusana, larangan bagi perempuan keluar malam, penghapusan maksiat dan pencegahan pelacuran. Selain itu, terdapat pula kebijakan yang bersifat himbauan, yang diterbitkan oleh kepala daerah. Himbauan Kepala Daerah Lhoksumawe –Aceh agar perempuan tidak duduk mengangkang pada saat membonceng sepeda motor.

Disamping Perda yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas, beberapa daerah menerbitkan Perda yang berpihak kepada perempuan dan kelompok minoritas. Setidaknya Koalisi Perempuan Indonesia mencatat 42 Perda yang berpihak pada perempuan, anak dan kelompok rentan. Yaitu Perda tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (8 Perda), Perda Pemenuhan Hak penyandang disabilitas (7 Perda), Perda Pengarusutamaan Gender (4 Perda), Perda Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) sebanyak 4 Perda, Perlindungan /Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan (14 Perda) dan Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (5 Perda)

2. Analisis Situasi di Tingkat Nasional

Tahun 2013, adalah tahun yang sangat menentukan bagi upaya peningkatan representasi politik perempuan. Menyambut pemilu yang akan dilaksanakan pada April 2014, sejumlah persiapan tengah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Sesuai dengan tahapan dan jadwal persiapan pemilu, sepanjang tahun 2013 ini dilakukan beberapa kegiatan, antara lain yaitu: penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), rekrutmen personil lembaga penyelenggara pemilu, penetapan daftar pemilih dan pendaftaran calon anggota legislatif.

Kemiskinan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, per September 2013 Jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 28,55 juta orang (11,47 persen), bertambah sebanyak 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebanyak 28,07 juta orang (11,37 persen).

Pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah, seharusnya berdasarkan pada tujuan pembentukan negara ini, yaitu melindungi, dan,

mencerdaskan warga negara serta mewujudkan kesejahteraan umum. Penyediaan layanan publik yang bermutu dengan jumlah memadai, terjangkau dari aspek jarak tempuh dan biaya, merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah. Demikian juga, pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan hak untuk hidup layak dan bermartabat seperti penyediaan lapangan kerja, dukungan dan kesempatan berusaha, perlindungan bagi buruh/pekerja untuk menikmati hak-hak *normatifnya*, pemenuhan pangan dan air minum sesuai kecukupan kebutuhan tubuh akan nutrisi, pemenuhan terhadap kebutuhan tempat tinggal yang sehat dan aman, layanan kesehatan dan pendidikan yang baik dan terjangkau, serta penikmatan rasa aman dan bebas dari rasa takut.

Namun sejumlah program pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui perluasan investasi, terutama investasi untuk eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam dan pembukaan industri perkebunan justru mengakibatkan penggusuran yang sangat efektif mengakibatkan pemiskinan secara cepat dan meluas. Pembukaan lahan eksploitasi pertambangan dan perkebunan, selalu diikuti dengan pembukaan industri seks yang merupakan bagian dari praktek perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, memicu dan meningkatkan *eskalasi* konflik, mereproduksi kekerasan terhadap perempuan, serta mempercepat penyebaran HIV –AIDS dan penyakit seksual menular lainnya.

Upaya penghapusan kemiskinan, melalui berbagai program bantuan sosial (Bansos) seperti Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan, bantuan permodalan Kelompok Usaha Bersama (Kube) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR), ternyata tidak mampu mengerem laju pertumbuhan jumlah penduduk miskin yang terjadi akibat kebijakan *liberalisasi* perdagangan. Kebijakan ini mengakibatkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Sementara pendapatan masyarakat per hari tidak mampu menjangkau harga kebutuhan pokok di pasar. Rendahnya daya beli masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok, mengakibatkan masyarakat, khususnya perempuan dan anak dihadapkan pada berbagai persoalan kemiskinan seperti kurang gizi, rendahnya derajat kesehatan dan rentan menjadi korban eksploitasi. Jumlah penduduk miskin tidak pernah berkurang secara signifikan ini pun dengan segera meningkat, akibat kebijakan kenaikan BBM. Sekurang-kurangnya setengah juta penduduk yang sebelumnya tidak tergolong miskin, jatuh miskin akibat kenaikan BBM. Untuk mengantisipasi kebijakan yang memiskinkan tersebut mengakibatkan penderitaan rakyat berkepanjangan, pemerintah meluncurkan kebijakan “pemadam kebakaran” dalam bentuk pembagian uang yang diberi nama Bantuan Langsung Sementara untuk masyarakat miskin (BLSM) dan Bea Siswa Miskin Pendidikan.

Sementara bantuan untuk kesehatan bagi masyarakat miskin seperti JAMKESMAS/JAMKESDA, Jampersal juga tidak cukup mampu menekan

angka Kematian Ibu (AKI) yang menurut data terbaru Kementerian Kesehatan di pertengahan tahun justru meningkat dari 288 per kelahiran hidup menjadi 359 per kelahiran hidup, dan ini sangat jauh dari indikator pencapaian MDG's yang ditetapkan 102 per kelahiran hidup pada tahun 2015. Penyediaan JAMKESMAS dan Jampersal untuk masyarakat selama ini tidak ditunjang oleh upaya pemerintah untuk merevitalisasi kemampuan dan ketercukupan sarana di Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas di daerah-daerah pedesaan dan minim infra struktur. Para pengguna jampersal hanya dapat dilayani di puskesmas ataupun rumah sakit daerah yang terkadang minim petugas kesehatan dan peralatan kesehatan yang menunjang. Selain itu pelaksanaan jampersal tidak dikuatkan juga dengan pemahaman budaya dalam keluarga dan masyarakat bahwa proses hamil dan melahirkan adalah proses yang penting untuk diperhatikan, dimulai dari kesehatan ibu selama hamil, pemeriksaan rutin kondisi kehamilan sampai dengan masa-masa nifas. Sejumlah data menunjukkan bahwa peningkatan AKI justru terjadi di pusat-pusat layanan kesehatan, seperti puskesmas dan klinik, karena buruknya jalan untuk menjangkau puskesmas, kurangnya tenaga kesehatan, tidak tersedianya bank darah dan kurangnya peralatan.

Dalam upaya mempertahankan pendidikan yang layak untuk anak-anak dan masyarakat juga masyarakat mendapatkan bantuan dana pendidikan dari pemerintah. Bantuan tersebut bermacam-macam, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan bea siswa. Beberapa bantuan diberikan setiap semester dan ada juga yang diberikan setiap sebulan sekali. Walaupun demikian bantuan tersebut masih terganjal pada pembiayaan diluar bantuan pendidikan formal. Biaya untuk seragam, buku, transportasi dan kegiatan di luar uang sekolah jauh lebih besar dan masyarakat miskin akhirnya tetap tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Dampak memprihatinkan dari semuanya adalah, keluarga harus merelakan anaknya tidak meneruskan pendidikan agar dapat membantu perekonomian keluarga. Tradisi keluarga-keluarga di Indonesia yang menomorduakan perempuan, mengakibatkan anak-anak perempuan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan mengakibatkan anak-anak perempuan masuk dalam lapangan pekerjaan yang termasuk pekerjaan terburuk bagi anak seperti menjadi pekerja rumah tangga, pekerja migran, atau terpaksa menikah di usia kanak-kanak.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan bahwa selama Tahun 2013 sekitar 26, 2 persen warga negara Indonesia telah didata dan mendapatkan program bantuan social, sebagai upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Namun penelitian Koalisi Perempuan Indonesia di 3 wilayah ; Jawa Timur, Bengkulu dan Jambi menunjukkan bahwa program bantuan sosial tak cukup jitu untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Dalam program raskin saja, misalnya ditemukan persoalan: data penduduk miskin yang tidak akurat sehingga mengakibatkan salah target penerima Raskin, kelompok paling miskin justru tidak mampu menebus harga beras Rp 1.600/kg dalam kemasan 15 kg, sehingga terpaksa Raskin ditebus oleh penduduk lain, dan penduduk miskin hanya menerima 3-5 Kg, jauhnya jarak tempuh pengambilan beras mengakibatkan penjualan raskin dilakukan setiap tiga bulan sekali, dan buruknya kualitas beras yang dijual hingga tidak layak untuk dimakan. Perempuan miskin terbebani dengan kerja dan biaya tambahan untuk

“... terkadang kami sudah tak mampu lagi makan beras raskin, bukannya kami sombong tetapi kondisi raskin yang kami terima sungguh tidak layak, bahkan untuk pakan ternak sekalipun..”¹

“memoles” beras, agar layak untuk dimakan.

Peruntukan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran pun terkadang justru menimbulkan konflik di dalam

masyarakat. Pengalaman anggota Koalisi Perempuan Indonesia di Balai Perempuan menunjukkan bahwa bantuan sosial yang tidak tepat sasaran menimbulkan kemarahan masyarakat, bahkan beberapa kasus pembakaran rumah Kepala Desa terjadi karena ketidakpuasan masyarakat.

Dibidang legislasi, selama tahun 2013, terdapat lima (5) rancangan undang-undang (RUU) yang berpengaruh bagi peningkatan peran dan kedudukan perempuan, Yaitu RUU Desa, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU Kesetaraan dan keadilan Gender (KKG), RUU Organisasi Masyarakat dan RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

RUU Desa memiliki pengaruh terhadap upaya meningkatkan peran dan kedudukan serta memenuhi Hak-hak Perempuan Desa, mengingat setengah dari penduduk desa adalah perempuan. Peran perempuan desa saat ini masih belum setara dengan laki-laki, dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pengambilan keputusan. Masih banyak tradisi yang merugikan perempuan/anak perempuan seperti aturan adat yang melarang perempuan menjadi pemimpin, hak waris hanya ada pada laki-laki, pidana adat yang memutuskan pemerkosa harus mengawini perempuan/anak perempuan yang diperkosa, dan sunat perempuan.

RUU Pemberdayaan dan perlindungan Petani berpengaruh terhadap keberadaan dan hak-hak petani perempuan, karena dalam RUU tersebut rumusan definisi petani menyebutkan laki-laki sebagai petani, sementara perempuan hanya sebagai isteri petani. Hal ini mengakibatkan perempuan tani tidak pernah diperhitungkan dalam program-program pemberdayaan dan perlindungan petani yang diselenggarakan oleh pemerintah.

RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri berpengaruh terhadap perempuan pekerja migrant. Sekitar 85 % pekerja migran Indonesia adalah perempuan. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pekerja domestik, rentan mengalami berbagai tindak eksploitasi dan kekerasan, serta berhadapan dengan hukum. Disamping itu, mereka mengalami berbagai persoalan hukum seperti ketidakjelasan status hukum perkawinan yang mereka lakukan, ketiadaan kewarganegaraan anak-anak yang dilahirkan oleh pekerja migran.

Sedangkan dua RUU lainnya, RUU Organisasi masyarakat (RUU Ormas) dan RUU Kesetaraan dan keadilan gender, berdampak luas terhadap laki-laki maupun perempuan. RUU ormas berpotensi merintangi hak kebebasan berserikat dan merintangi sikap kritis terhadap pemerintah, karena dalam RUU tersebut mengatur kewenangan tanpa batas yang dimiliki oleh pemerintah untuk membekukan dan tidak member ijin organisasi. Sedangkan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk memastikan jaminan kesetaraan dan keadilan gender serta pengarusutamaan gender dalam peraturan perundangan.

3. Analisis Situasi di Tingkat Internasional

Sejak Millennium Summit 2000, Millennium Development Goal (MDG) menjadi acuan bagi hampir semua negara, sebagai komitmen untuk mengurangi setengah penduduk miskin di dunia. Terlepas dari pencapaian dari tiap-tiap negara dan kritik terhadap kerangka kerja MDG, agenda untuk mengurangi jumlah penduduk miskin ini, sejak awal telah disepakati akan berakhir pada 2015.

KTT Rio + 20 Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan, yang diselenggarakan pada 13-22 Juni 2012 di Rio De Janeiro, disepakati

Dokumen **THE FUTURE WE WANT** yang menjadi arahan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, regional, dan nasional. Dokumen memuat kesepahaman pandangan terhadap masa depan yang diharapkan oleh dunia (**COMMON VISION**) dan penguatan komitmen (**RENEWING POLITICAL COMMITMENT**). untuk menuju tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk penyusunan **SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) POST-2015** PBB membentuk Panel (tim) yang disebut **HIGH-LEVEL PANEL OF EMINENT PERSONS ON THE POST-2015 DEVELOPMENT AGENDA, HLPEP**) terdiri dari 3 orang *Co-chair* Perdana Menteri Inggris Raya David Cameron, Presiden Liberia Ellen Johnson-Sirleaf, Presiden Indonesia **Susilo Bambang Yudoyono (SBY)** + 23 anggota + 1 *ex-officio* + 1 *executive secretary*. Tim tersebut merupakan Representasi pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan pemuda dengan memperhatikan keseimbangan geografi dan gender – masing-masing dalam kapasitas pribadi. Panel ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan serangkaian konsultasi di tingkat nasional, regional dan global serta mengkonsolidasi hasil konsultasi terkait Agenda & Kerangka Kerja Pembangunan berkelanjutan.

Sehubungan dengan peran penting Indonesia dalam menyampaikan usulan tentang visi dan agenda SDG, terutama karena keterlibatan Presiden SBY sebagai Co Chair HLPEP, Indonesia menjadi Tuan rumah pertemuan HLPEP yang diselenggarakan di Bali, pada 24-27 Maret 2013. Proses ini kemudian didahului dengan serangkaian kegiatan konsultasi di tingkat nasional dan regional. Namun, proses konsultasi yang tengah berjalan saat ini, belum banyak melibatkan organisasi perempuan di tingkat nasional maupun daerah absennya keterlibatan organisasi perempuan Indonesia dalam proses konsultasi yang tengah berjalan akan berakibat pada kurangnya hilangnya kesempatan untuk menyuarakan visi, misi dan agenda Pembangunan dari perspektif organisasi perempuan di Indonesia. Pada gilirannya, tidak adanya partisipasi organisasi perempuan Indonesia ini akan berdampak pada kurangnya komitmen dan rasa memiliki (*ownership*) terhadap Agenda Post 2015.

Disisi lain, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tengah mengkampanyekan agar negara-negara memenuhi hak atas tempat tinggal yang layak dan *Special Rapporteur on Adequate Housing* berencana untuk hadir di Indonesia. Koalisi Perempuan Indonesia diminta oleh *United Nation on Development Program (UNDP)* untuk ikut dalam pertemuan dengan *Special Rapporteur on Adequate Housing* untuk menyuarakan pengalaman perempuan dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak.

Selain itu, pada tahun 2014 Indonesia berkewajiban untuk mengirimkan laporan implementasi dan menghadiri sidang di kantor Pusat PBB di Genewa yang membahas laporan Pemerintah Indonesia tentang implementasi konvensi Internasional Hak Sipil Politik dan Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2005

Sementara di tingkat regional, Asean Commission for Women and Children (ACWC) tengah menyusun agenda kerja untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat ASEAN. Sejumlah isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat sipil di ASEAN seperti : Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan terhadap anak, perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, perkawinan di usia anak, migrasi, kerjasama bidang pembangunan dan ekonomi serta peningkatan representasi politik perempuan terus didorong oleh masyarakat sipil.

BAB II

RESPON KOALISI TERHADAP SITUASI & PELAKSANAAN PROGRAM

Untuk merespon situasi di tingkat Daerah, Nasional dan Internasional, Koalisi Perempuan Indonesia menggunakan strategi Advokasi untuk Reformasi Kebijakan Publik dan Pengorganisasian serta menyediakan dukungan program dan kelembagaan agar pelaksanaan advokasi dan pengorganisasian mencapai target sesuai perencanaan.

1. Reformasi Kebijakan Publik

Koalisi Perempuan berkepentingan untuk mengawal proses persiapan pemilu, memastikan pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara PEMILU. terutama terkait ketentuan sekurang-kurangnya 30% perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Koalisi Perempuan mengawal proses penyusunan PKPU, melalui kegiatan lobby, kampanye dan penyerahan kertas posisi kepada KPU. Pengawasan PKPU ini ditujukan agar ketentuan jaminan keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif, yang sudah diatur dalam UU Pemilu, ditegaskan dalam PKPU. Disamping itu, Koalisi Perempuan Indonesia juga mendorong kader-kadernya untuk mengikuti proses rekrutmen calon komisioner Komisi Pemilihan Umum dan komisioner Badan/Panitia Pengawas Pemilu, melalui upaya mendorong kader koalisi perempuan untuk terlibat sebagai tim seleksi KPU dan menyampaikan Surat rekomendasi atau dukungan bagi kader yang masuk dalam daftar 10 besar . Koalisi Perempuan juga mendorong kadernya yang aktif di dalam partai politik terlibat dalam rekrutmen calon anggota legislatif.

Untuk memperkuat kapasitas perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan kegiatan penyusunan modul, menyusun paduan dan menyelenggarakan pelatihan. Ada tiga modul yang disusun Koalisi Perempuan Indonesia, yaitu Modul Pelatihan Keterampilan Politik Bagi Perempuan Calon Legislatif , Modul Manajemen Kampanye bagi Perempuan Calon Legislatif, Modul Pendidikan Pemilih. Sedangkan panduan yang dihasilkan Koalisi Perempuan Indonesia adalah tentang : 7 langkah memenangkan hati Pemilih, Etika Kepemimpinan Politik dan Panduan menyusun kontrak politik dengan calon legislatif.

Sedangkan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan untuk menyongsong Pemilihan Pemilu adalah : **1)** Pelatihan Bagi Fasilitator atau Pelatih calon Legislatif Perempuan (ToT) diselenggarakan di 2 wilayah secara *simultan*, di Makasar dan di DKI Jakarta pada Bulan Desember 2013, **2)** Pelatihan Manajemen Kampanye bagi perempuan calon legislatif di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada November –Desember, **3)** Pelatihan Ketrampilan Politik bagi perempuan calon legislatif, pelatihan tingkat nasional dilaksanakan di Bandung – Jawa Barat dan **4)** Pelatihan ToT bagi fasilitator atau pendidik untuk pemilih dilaksanakan di Bogor pada Bulan Desember 2013, wilayah DI Aceh, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta, **5)** dialog Publik dengan tema Perempuan dan PEMILU yang diselenggarakan pada bulan Nopember 2013 di NTB (Bima dan Kota Mataram) dan NTT (Sikka dan Sumba Timur) yang melibatkan para calon anggota legislatif perempuan, calon DPD NTT dan NTB, KPU, Panwaslu , anggota Koalisi Perempuan , Biro Pemberdayaan Perempuan untuk mengali komitmen para caleg dan membuka ruang diskusi antara caleg dan pemilih.

Merespon proses legislasi enam RUU yang dikawal oleh Koalisi Perempuan Indonesia (RUU Desa, RUU KKG, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU Ormas dan RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri) yang terjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Koalisi Perempuan Indonesia melakukan beberapa kerja advokasi, antara lain secara formal dan informal, kampanye dan berjejaring dengan masyarakat sipil. Lobby secara formal dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan audiensi kepada fraksi-fraksi di DPR, audiensi dengan kementerian terkait dan menyerahkan kertas posisi atau dokumen usulan Koalisi Perempuan Indonesia. Sedangkan lobby secara informal dilakukan melalui komunikasi dengan Kaukus Perempuan Parlemen dan komunikasi dengan anggota-anggota DPR yang selama ini sudah menjadi mitra Koalisi Perempuan Indonesia. Selain lobby, Koalisi Perempuan Indonesia juga melakukan kampanye, melalui talkshow radio dan televisi, konferensi pers dan mempublikasikan pernyataan sikap Koalisi Perempuan Indonesia. Sedangkan kerja jejaring dilakukan dengan jaringan yang memiliki kesamaan agenda dalam pengawalan RUU yang sedang terjadi.



Untuk merespon situasi aktual di tingkat nasional, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan :

- Konferensi Pers “Pemberitaan Praktek Poligami di Media yang tidak Mendidik Masyarakat”

dilakukan bersama dengan jaringan perempuan tolak poligami; AMAN, Kalyanamitra, Magenta, LBH Apik, LBH Jakarta, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), RAHIMA, Kapal Perempuan, Fatayat NU, Muslimat, dan Perempuan Ahmadiyah.

- Melakukan serangkaian kegiatan advokasi bersama dengan jaringan Koalisi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul (KKB) untuk membuat panduan singkat bagi ormas daerah untuk merespon tindakan pembatasan kegiatan berorganisasi.
- Penyusunan *blue print* advokasi bersama untuk layanan publik dalam jaringan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) melalui beberapa workshop dan konsinyering
- Melakukan rapat persiapan *Judicial Review* untuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bersama dengan jaringan perempuan.
- Menyusun usulan untuk PERKA Pengarusutamaan Gender untuk Respon Darurat kebencanaan dan menyampaikannya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Tinjau ulang kinerja KOMNAS HAM terhadap penyusunan draft *National Preventive Measure* untuk tindakan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi bersama dengan Working Group on Anti Torture (WGAT)

Untuk merespon situasi Internasional yang berkaitan dengan peran Indonesia di PBB, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan :

1. Mempersiapkan bahan lobi untuk Special Rapportour on Adequate Housing, Ms Raquel Rolnik yang melakukan kunjungan ke Indonesia pada Bulan Juni yang lalu. Koalisi Perempuan Indonesia membawakan isu mengenai budaya lokal yang masih menghambat perempuan untuk memperoleh hak atas perumahan dan kualitas tempat tinggal yang layak. Anggota KPI dari Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya hadir untuk menyampaikan testimony dan rekomendasi kepada Special Rapportour.
2. Pembahasan dan penyusunan atas list of issue komite (ICCPR) Hak sipil dan Politik yang pada 8-11 July 2013 ini akan disidangkan di Genewa. Penyusunan ini dilakukan bersama dengan jaringan HRWG , Koalisi Perempuan Indonesia membahas khusus isu perempuan dalam ICCPR.
3. Untuk mempersiapkan sidang pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESR) yang telah terjadwal pada April-Juni 2014 mendatang, Koalisi Perempuan Indonesia bersama dengan jaringan kerja HAM dan Pro Demokrasi menginisiasi sebuah training penulisan laporan independent masyarakat sipil kepada komite ICESR. Pelatihan ini diberikan oleh rekan PWESCR. Laporan independent masyarakat sipil akan dipersiapkan selama Bulan Desember 2013 sampai dengan Maret 2014
4. Koalisi Perempuan Indonesia tergabung dalam Pokja Gender dan HAM yang dikapasitasi oleh Komisi Penanggulangan HIV AIDS juga bersama-sama membuat *policy brief* yang diangkat dari pelaksanaan SRAN 2010-2014. Dan mempersiapkan laporan untuk pertemuan UNAIDS 2014 yang akan memberikan laporan khusus tentang penemuan kasus baru prevalensi HIV AIDS yang meningkat pada kelompok perempuan pasangan ODHA atau kelompok Ibu Rumah Tangga, Buruh Migran, dan perempuan di *workplace area*.

Advokasi Isu Gender dan Pembangunan di tingkat Nasional & Internasional

1. Advokasi Merespon Agenda Pembangunan Berkelanjutan Pasca 2015, dilakukan melalui beberapa kegiatan:
 - 1) Konsolidasi jaringan masyarakat sipil untuk mempersiapkan pertemuan High Level Meeting of Eminent Person di Bali
 - 2) Penyusunan Policy brief dan factsheet Pembangunan Pasca 2015 berdasarkan pengalaman perempuan di akar rumput
 - 3) Pelaksanaan dialog publik untuk menarik aspirasi masyarakat sipil khususnya perempuan dan agenda pembangunan berkelanjutan, di Tomohon, Pontianak, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
 - 4) Konsultasi Publik : Refleksi Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (*Millennium Development Goal –MDG*) dan Agenda Pembangunan Pasca MDG (*Development Agenda Post 2015*) –SDG



- : dilakukan di NTT (kupang, 1-2 februari 2013) dan Nasional Kegiatan ini mempertemukan masyarakat di tingkat desa dengan pengambil kebijakan di tingkat provinsi (BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Koperasi, Biro Pemberdayaan Perempuan, pemerintah desa dan anggota legislative) dan lembaga jaringan Koalisi Perempuan Indonesia di Provinsi maupun nasional.
- 5) Menyusun dokumen Diplomat Briefing dan terlibat dalam diplomat briefing yang diselenggara oleh INFID sebagai bentuk koordinasi dan sosialisasi masyarakat sipil terhadap pembangunan pasca 2015
 - 6) Pelaksanaan Konsultasi Nasional Pembangunan Berkelanjutan Pasca 2015 di Jakarta
 - 7) Mengikuti Global CSO Outreach Forum di Bali untuk menyusun rumusan dan masukan masyarakat sipil dalam HLPEP Meeting ke-4 di Bali, khususnya memberi masukan isu gender dalam pembangunan.

- 8) Setelah laporan HLP diluncurkan pada Bulan Juli 2013 , Koalisi Perempuan Indonesia juga ikut mengawal posisi Indonesia dalam Post 2015 dengan melakukan advokasi kepada BAPPENAS, dan Kementerian Luar Negeri yang tetap mengikuti proses-proses pembahasan pembangunan pasca 2015 dalam Open Working Group (OWG)
2. **Bersama dengan INFID dan beberapa organisasi masyarakat sipil melakukan advokasi FORUM G20**, dengan menyusun policy brief dan persiapan pertemuan CSO di Moskow dan London.
3. **ASEAN regional Conference Women Fight Corruption, diselenggarakan bersama dengan UNODC** dengan menghadirkan perwakilan anggota KPI di Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Samarinda, Tarakan, Kutai Kertanegara, NTB, NTT, Aceh, dan Sulawesi Selatan untuk bertemu secara langsung dengan jaringan Regional ASEAN untuk mendiskusikan pengalaman-pengalaman terbaik perempuan melawan korupsi di tingkat basis.



4. Konsultasi Isu-isu strategis dan Agenda ACWC yang diselenggarakan oleh representative Indonesia dalam ACWC . Koalisi Perempuan Indonesia mengusulkan agar isu Perdagangan manusia, migrasi, keterwakilan Politik Perempuan dan perkawinan anak menjadi agenda ACWC.

Peran organisasi-organisasi perempuan di Indonesia, termasuk Koalisi Perempuan Indonesia dalam advokasi di tingkat Internasional masih belum terlalu kuat. Masih dibutuhkan upaya-upaya untuk memperkuat peran organisasi perempuan di Indonesia untuk terlibat dalam advokasi internasional.

Penguatan kapasitas Pokja Reformasi Kebijakan Publik

1. Pelatihan Monitoring Hak Asasi Manusia tentang Kebebasan Beragama, diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan di Depok, Jawa Barat, Oktober 2013
2. Pelatihan untuk Advokasi isu Pembangunan dan Hak Asasi Manusia (GALAA Acedemy) diselenggarakan oleh FORUM ASIA dan CARITAS Asia, Agustus, 2013 Bangkok Thailand
3. Pelatihan Manajemen Program dan Keuangan bagi Mitra Development and Peace dilaksanakan di Makasar, Desember 2013
4. Pelatihan Advokasi berbasis Evidence untuk memperkuat Advokasi Kebijakan Publik, Desember 2014, diselenggarakan oleh Kemitraan – IKAT US di Siem Reap, Cambodia
5. Pelatihan penulisan laporan independent hak ekonomi sosial dan budaya, diselenggarakan oleh PWESCR, Koalisi Perempuan Indonesia, dan TURC, Desember 2013

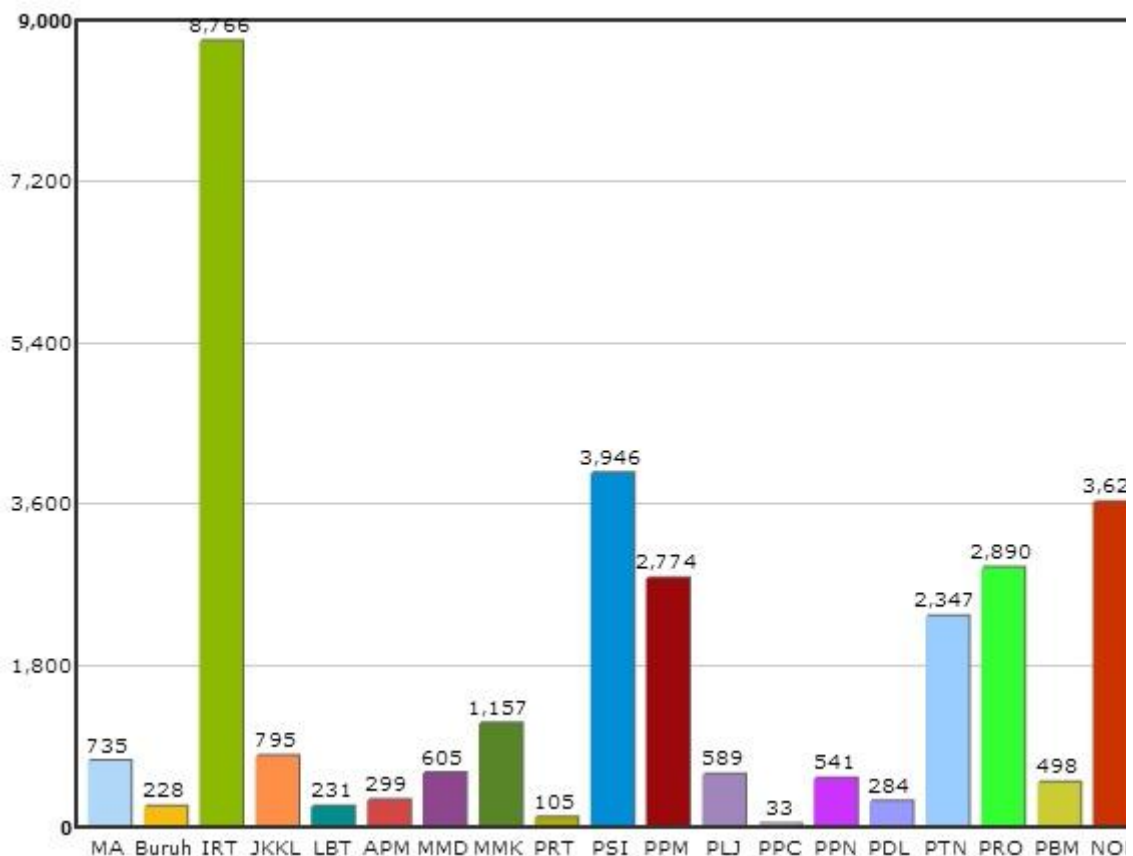
2. Penguatan Organisasi dan Anggota

Kelompok kerja Penguatan Organisasi (Pokja PO) memiliki mandat untuk melakukan pengembangan dan penguatan organisasi melalui kerja pengorganisasian yang didalamnya *termaktub* kerja pemetaan dan analisa social, sosialisasi organisasi, penguatan calon anggota, anggota dan kader organisasi melalui berbagai cara seperti diskusi tematik dalam kelompok-kelompok kepentingan, pendidikan kader berjenjang, pendidikan khusus yang dibutuhkan anggota, pertemuan-pertemuan formal dan informal.

Proses pengorganisasian merupakan kerja yang tidak mengenal batas waktu; dalam arti harus dilakukan terus-menerus. Pertemuan dengan kelompok yang diorganisir tidak terbatas pada pertemuan formal tetapi juga pertemuan-pertemuan informal dimana seorang kader/organizer harus mampu menyesuaikan dengan waktu yang dimiliki kelompok yang diorganisir. Pengorganisasian Koalisi Perempuan Indonesia dapat dilakukan berbasis area tempat tinggal kelompok yang diorganisir (dusun, banjar, nagari, desa, kelurahan) dan atau berbasis kelompok kepentingan (lihat 18 kelompok kepentingan di AD ART). Pilihan Alat-alat atau media pengorganisasian dapat

beragam berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing. Oleh karena itu dituntut kader yang kreatif dalam memilih dan menggunakannya. Upaya peningkatan kapasitas kader sebagai *organizer* tidak dapat dilakukan hanya dalam 1 kali training saja, tetapi harus ada upaya-upaya pengkayaan dengan berbagai cara dan terpenting adalah mengasahnya dalam praktek – melakukan pengorganisasian masyarakat.

Pemetaan Kelompok Kepentingan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran perkembangan kelompok kepentingan dalam kerja pengorganisasian dan advokasi. Pemetaan kelompok kepentingan pada tahun 2013 tidak dilakukan dalam kegiatan khusus melainkan menggunakan ruang-ruang organisasi yang berjalan seperti pendidikan kader, konferensi cabang, kongres wilayah dan rapat-rapat kerja. Perkembangan anggota koalisi perempuan Indonesia berbasis kelompok kepentingan hingga saat ini masih menunjukkan angka tertinggi pada kelompok kepentingan ibu rumah tangga dan terendah kelompok kepentingan perempuan penyandang cacat selain itu juga masih terdapat data anggota yang belum jelas kelompok kepentingannya karena tidak tertulis dalam data yang diterima setnas.



Keterangan :

1. MA = Perempuan Masyarakat Adat;

2. Buruh = Perempuan Buruh;
3. IRT = Perempuan Ibu Rumah Tangga;
4. JKKL = Perempuan Janda, Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan Lajang;
5. LBT = Lesbian, Biseksual dan Trans-gender;
6. APM = Anak Perempuan Marjinal;
7. MMD = Perempuan Masyarakat Miskin Desa;
8. MMK = Perempuan Masyarakat Miskin Kota;
9. PRT = Perempuan Pekerja Rumah Tangga.
10. PSI = Perempuan Pekerja Sektor Informal;
11. PPM = Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa;
12. PLJ = Perempuan Lansia (lanjut usia) dan Jompo;
13. PPC = Perempuan Penyandang Cacat;
14. PPN = Perempuan Pesisir dan Nelayan;
15. PDL = Perempuan yang Dilacurkan (Pedila);
16. PTN = Perempuan Petani;
17. PRO = Perempuan Profesional;
18. PBM = Perempuan Buruh Migran;
19. NOL = Tidak ada Kelompok Kepentingannya.

Merespon kebijakan perlindungan sosial yang diselenggarakan pemerintah, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan **Riset Aksi “Akses Perempuan Terhadap Program Perlindungan Sosial”**. Kegiatan ini dilakukan di tiga Provinsi yaitu Jambi, Bengkulu dan Jawa Timur. Riset aksi ini dimaksudkan untuk melihat manfaat program perlindungan sosial, khususnya Beras untuk Kaum Miskin (Raskin) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di 27 desa di ketiga provinsi tersebut. Riset aksi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang akses perempuan terhadap Raskin dan Jamkesmas. Hasil Riset Aksi digunakan untuk menyusun strategi advokasi dan pengorganisasian perempuan untuk memperluas akses perempuan terhadap perlindungan sosial.

Pengorganisasian di Koalisi Perempuan Indonesia dilakukan secara terus-menerus oleh semua anggota dan kader di wilayah masing-masing. Dalam konteks program kerjasama dengan pihak ketiga melalui setnas,

pengorganisasian yang direncanakan dalam tahun 2013 ada di area dukungan program MAMPU-Ausaid masa kerjasama I (Jambi, Bengkulu dan Jatim) dan masa kerjasama II dimulai November 2013 – Juni 2014 (Aceh, Sumbar, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sultra, Sulsel, Sulteng), dukungan program Access Phase II hingga Maret 2013 (NTB, NTT, Sulsel dan Sultra), dukungan Oxfam masa kerjasama I hingga Juni 2013 dan kerjasama II September 2013 – Juni 2014 (NTB dan NTT), dukungan ICCO Belanda (Bali, Maluku Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa dan Tomohon).



Pengorganisasian yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan berkaitan dengan kerja sama dengan pihak ketiga menghasilkan penambahan anggota sebanyak 939 perempuan. Dilihat dari kelompok kepentingan, penambahan anggota pada kelompok kepentingan (KK), sebagai berikut :

- 1) KK Ibu Rumah Tangga : 307 anggota
- 2) KK janda kepala keluarga dan lajang : 17 anggota
- 3) KK Perempuan miskin desa : 17 anggota
- 4) KK Perempuan miskin kota : 33 anggota
- 5) KK Perempuan pekerja sector informal : 209 anggota
- 6) KK Pemuda pelajar mahasiswa : 38 anggota
- 7) KK Perempuan lanjut usia dan jompo : 9 anggota
- 8) KK Perempuan yang dilacurkan : 1 anggota
- 9) KK Perempuan petani : 284 anggota
- 10) KK Perempuan profesional : 12 anggota
- 11) Belum memilih kelompok kepentingan 21 anggota

Disamping itu, Balai Perempuan, Cabang dan Wilayah melakukan pengorganisasian secara mandiri dan menghasilkan pertambahan anggota sebanyak 1.359 perempuan.

Selain melakukan pengorganisasian untuk menambah jumlah anggota, Koalisi Perempuan Indonesia juga menyelenggarakan forum kongres Wilayah, Konferensi Cabang, dan Rembug Balai Perempuan untuk pembentukan struktur organisasi atau pergantian pengurus dan pereumusan agenda kerja di Wilayah (di tingkat provinsi), Cabang (di tingkat



kabupaten/kota), Balai Perempuan (di tingkat desa).

Selama tahun 2013 dilakukan Rembug Balai Perempuan I di 97 desa, Konferensi Cabang I di 9 Kabupaten/kota. Sedangkan di tingkat provinsi tidak diselenggarakan Kongres I, karena tidak direncanakan penambahan Wilayah.

Sekretariat nasional menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional sebagai mekanisme pengambilan keputusan untuk mengevaluasi pelaksanaan program di tahun sebelumnya dan mengesahkan rencana kerja tahun 2013. Selain itu, Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia memfasilitasi terselenggaranya Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja Balai Perempuan.

Peningkatan kapasitas kepemimpinan dilakukan melalui beberapa pelatihan, yaitu Pendidikan Kader berjenjang yang meliputi, Pendidikan Kader Dasar (PKD), Pendidikan Kader Menengah (PKM) dan Pendidikan Kader Lanjut (PKL) dan beberapa pendidikan khusus lainnya, seperti Pendidikan untuk calon legislative, pelatihan advokasi, pelatihan pengorganisasian, dan pelatihan kepemimpinan. Untuk menyediakan bahan pelatihan, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan revisi modul PKD, menyusun kurikulum pendidikan pengorganisasian dan modul-modul yang digunakan untuk merespon pemilu. Untuk mencetak fasilitator, Koalisi Perempuan menyelenggarakan Pelatihan untuk Pelatih atau Training of Trainer.



Selain untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan anggota, Pendidikan Kader Dasar (PKD) juga untuk melakukan identifikasi isu-isu strategis yang dialami di desa yang perlu diadvokasi.

Beberapa isu strategis yang ditemukan dari PKD antara lain :

- 1) Poligami dan perselingkuhan
- 2) Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak
- 3) Praktek tradisi yang merugikan perempuan seperti Sunat Perempuan, Belis (pembayaran sejumlah harta untuk perkawinan), tidak diakuinya Hak Waris perempuan dan perkawinan anak
- 4) Ekonomi : Kemiskinan dan rendahnya akses perempuan pada perlindungan sosial
- 5) Tinggi angka putus sekolah

- 6) Lingkungan hidup : rendahnya akses terhadap air bersih, buruknya sanitasi, kerusakan lingkungan akibat investasi di bidang pertambangan dan perkebunan

Untuk merespon situasi kebencanaan, Koalisi Perempuan Indonesia menggalang solidaritas dalam bentuk pengumpulan dana dan barang yang dibutuhkan oleh korban bencana.

3. Dukungan Program

Dukungan untuk pelaksanaan program Reformasi Kebijakan Publik yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Reformasi Kebijakan Publik (Pokja RKP) dan Pengorganisasian, yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Penguatan Anggota dan Organisasi (Pokja PO) dilakukan oleh divisi-divisi, yaitu Divisi Penelitian Pengembangan Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Litbang SMI-TI), Divisi Keuangan, Divisi Kerumahtanggaan.

Divisi Litbang SMI-TI mengelola penelitian, mempromosikan alat Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pengelolaan website dan media sosial, kerja sama dengan media, mendistribusikan pernyataan sikap Koalisi Perempuan Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Tim Litbang adalah tentang Akses Perempuan terhadap Perlindungan sosial dan kajian peraturan perundangan yang mengatur tentang Perlindungan sosial

Website Koalisi Perempuan Indonesia pada periode ini dikunjungi oleh 11.785 dengan pengunjung per hari rata-rata 75 pengunjung. Terjadi penurunan kunjungan hal ini karena pada bulan Juli – Agustus ada penurunan pengunjung karena situasi libur puasa dan hari raya. Pengunjung diatas 2.000 orang terjadi mulai September – Desember 2013. Hal ini juga karena update berita lebih kontinyu. Posting berita selama periode ini sebanyak 25 materi berita , sehingga perbulan rata-rata 6 berita ini lebih banyak dibandingkan periode 6 bulan yang lalu. Fan page Koalisi Perempuan Indonesia di Facebook disukai oleh 877 orang tidak mengalami tambahan yang banyak. sementara untuk FB yang dikelola Setnas sampai Desember 2013 mempunyai teman sebanyak 1664. Twitter women coalition sampai Desember 2013 mempunyai follower sebanyak 604 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama 6 bulan

Produksi KIE yang dihasilkan selama tahun 2013 :

1. Pembuatan Factsheet 7 langkah Memenangkan hati pemilih sebanyak 2000 eksemplar
2. Pembuatan lembar informasi tentang Perlindungan Sosial
3. Pembuatan Kartu Iuran anggota
4. Pembuatan kaos promosi organisasi dengan tagline ' Bersama Mewujudkan Keadilan dan Demokrasi ' sebagai sarana fundraising organisasi .
5. Pembuatan Factsheet Seri demokrasi, sebanyak 6 seri.
6. Penerbitan buletin SEMAI edisi Perempuan dan Pemilu , edisi SDG
7. Pencetakan alat Peraga dan petunjuk pelaksanaan Pemilu

Pernyataan Sikap Organisasi yang didistribusikan dan dimuat di media Selama Tahun 2013

No	Pernyataan Sikap	Waktu Publikasi
1	Pernyataan Sikap Menjelang Hari Perempuan Internasional	Maret 2013
2	Diplomat Briefing, Masukan gerakan Perempuan dalam Proses Pembangunan Pasca 2015	Maret 2013
3	Resolusi Jakarta, Women & anti Corruption Movement	Maret 2013
4	Tindakan Khusus Terhadap Perempuan dalam Daftar Calon Sementara (DCS)	April 2013
5	Kenaikan BBM Tidak Adil Bagi Perempuan dan Anak	Mei 2013
6	Pernyataan Tentang KPU harus umumkan pelaksanaan keputusan BAWASLU tentang DCS	Juli 2013
7	Pernyataan Simpati kepada korban Badai Topan di Philipina	November 2013
8	Hari Pergerakan Perempuan 85 Tahun dan disahkannya UU Desa	Desember 2013

1. Talkshow di radio / tv

- a. Talkshow di KBR 68 membahas tentang keterwakilan perempuan dalam DCT dan penyelenggara PEMILU
 - b. Talkshow di Tempo TV dan AoRA TV Keterwakilan Perempuan dalam DCT
 - c. Talkshow di Radio KBR 68 H CALEG Perempuan Merespon isu HAM dan Gender
 - d. Talkshow di Tempo TV CALEG Perempuan Merespon isu HAM dan Gender
2. Berita di Media
- Beberapa media memuat berita tentang aktifitas atau kegiatan yang dilakukan baik yang dilakukan oleh SEKJEND atau staf Sekretariat nasional. Ada 26 kliping media terkait kegiatan organisasi dengan isu antara lain keterwakilan perempuan , pembangunan berkelanjutan, Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)
3. Konferensi Pers
- a. Konferensi pers dilaksanakan di Bakoel Koffie Launching hasil pemetaan cepat keterwakilan perempuan dalam DCT
 - b. Konferensi pers dalam menyikapi hasil survey jurnalistik tentang AKI bersama INFID
4. Pencetaan dokumen organisasi
- a. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumat Tangga (ART)
 - b. Buku Saku Panduan memahami organisasi
 - c. Brosur dan profil organisasi
 - d. Film dan alat peraga penyelenggaraan pendidikan kader

Dukungan Program oleh divisi Keuangan mencakup: Perencanaan Keuangan untuk pelaksanaan Workplan, Perencanaan Keuangan untuk pengajuan proposal, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan serta pelaksanaan audit oleh akuntan public.

Dukungan program divisi Kerumahtanggaan pengurusan dokumen legal organisasi (Surat Tanda Terdaftar, Akta notaries, NPWP dan ijin domisili) dan distribusi copy dokumen legal, dokumen organisasi (AD/ART, Buku Saku, dan brosur) ke pengurus di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa.

4. Dukungan Kelembagaan

Dukungan Kelembagaan untuk menukung pencapaian visi-misi organisasi, dalam bentuk :

- 1) Penyediaan kantor, peralatan (furniture dan computer), alat tulis kantor,
- 2) Tata kelola Sekretariat
- 3) Managemen personalian (administrasi personalia, gaji staff, asuransi, cuti dll)
- 4) Penggalangan dana
- 5) Kerja sama dengan berbagai pihak

BAB III

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM

1. Capaian advokasi untuk Reformasi Kebijakan Publik antara lain

- 1) Diakomodirnya prinsip kesetaraan dan Keadilan Gender dan dirumuskannya definisi petani yang mengakomodir petani perempuan dalam RUU Perlindungan dan pemberdayaan Petani yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- 2) Diakomodirnya beberapa usulan kedalam RUU Desa yang telah disahkan pada Desember 2013 dan diundangkan menjadi Undang-undang (UU) No 6 Tahun 201 tentang Desa. Yaitu: tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di desa dan pembatasan hukum adat yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak perempuan, prinsip keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan desa. Dalam UU Desa ditentukan bahwa salah satu kewajiban Kepala desa adalah melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender (Pasal 26 ayat (4), prinsip keterwakilan Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pembatasan dalam pelaksanaan hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum
- 3) Advokasi untuk menolak RUU Organisasi Masyarakat (Ormas), tidak berhasil dan RUU Ormas disahkan menjadi UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Namun ada capaian disisi lain, yaitu terkonsolidasinya organisasi masyarakat sipil dan gerakan perempuan.
- 4) Sejumlah 18 orang kader Koalisi Perempuan Indonesia menjadi Komisioner KPUD Provinsi dan Komisioner KPUD Kabupaten/Kota , yaitu 2 orang di KPUD Provinsi Sulawesi Utara, 1 orang di KPUD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 1 orang di KPUD Provinsi Jawa Timur, 1 orang di KPUD Provinsi Sulawesi Selatan. Di Provinsi Jawa Tengah terapat 3 orang di KPUD Kabupaten/kota, di Jawa Timur terapat 6 orang di KPUD Kabupaten/Kota, di DIY terdapat 1 orang di KPUD Kota, di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 3 orang di KPUD Kabupaten/kota

- 5) Terlibatnya Koalisi Perempuan Indonesia dalam advokasi di tingkat Internasional dalam isu pembangunan. Hal ini merupakan perluasan isu dalam advokasi di tingkat internasional. Sebelumnya, Koalisi Perempuan Indonesia hanya aktif I isu HAM.
- 6) Isu perempuan dan ketimpangan sosial di Indonesia menjadi sorotan penting di forum pembangunan pasca 2015
- 7) Menguatnya gerakan perempuan dalam isu transparansi, akuntabilitas dan anti korupsi
- 8) Menguatnya gerakan perempuan dalam menolak politik intoleransi dan kekerasan perempuan berbasis gender
- 9) Menguatnya perhatian anggota dan pengurus Koalisi Perempuan Indonesia terhadap program-program Perlindungan sosial dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- 10) Menguatnya keterlibatan Koalisi Perempuan Indonesia dalam kegiatan advokasi di tingkat Internasional, khususnya untuk isu pembangunan

2. Capaian dari kegiatan dan program Penguatan Organisasi dan anggota, antara lain:

- 1) **Pertambahan Anggota** : sebanyak 2.298 perempuan, dari jumlah anggota 35.307 di tahun 2012 menjai 37.605 anggota di tahun 2013
- 2) Bertambahnya **struktur organisasi di tingkat desa** (Balai Perempuan): **sebanyak 97 Balai Perempuan (BP)** pada semester I, 2013 sehingga BP Koalisi Perempuan Indonesia dari 627 BP, di tahun 2012 menjadi 724 BP dan bertambahnya 141 BP pada semester II sehingga **pada akhir tahun 2013 terdapat 865 Balai Perempuan.**
- 3) Bertambahnya struktur organisasi di tingkat Kabupaten/kota (Cabang) : sebanyak 9 cabang sehingga Cabang-cabang Koalisi Perempuan Indonesia bertambah dari 104 cabang I tahun 2012 menjadi **113 cabang di tahun 2013 .**
- 4) Terbentuknya **BP dan cabang** baru di area pengorganisasian baru : Bali (Denpasar, Tabanan, Bangli, Karangasem), NTT (SBD, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur), Maluku Utara (Ternate dan Tidore).
- 5) Penguatan kelompok kepentingan (KK) dengan strategi dan media yang variatif: penguatan ekonomi, advokasi kebijakan, advokasi kasus, penguatan kapasitas.

- 6) Isu-isu baru yang diadvokasi Koalisi Perempuan Indonesia, seperti: Korupsi, Transparansi dan akuntabilitas, perlindungan Sosial dan pelayanan public menjadi pintu masuk pengorganisasian yang efektif meningkatkan keaktifan anggota
- 7) Pendekatan pengorganisasian yang digunakan Koalisi Perempuan Indonesia menginspirasi organisasi lain.
- 8) Kader Koalisi Perempuan Indonesia dipercaya menjadi fasilitator, narasumber, posisi strategis di lembaga-lembaga lain dari tingkat daerah hingga internasional
- 9) Bertambahnya kader dan jejaring (khususnya Calon Legislatif) yang menjadi penerima manfaat dari program-program peningkatan kapasitas (lihat table di bawah)
- 10) Bertambahnya jenis modul Koalisi Perempuan Indonesia sebanyak 3 modul dan bertambahnya syllabus pendidikan

Tabel 1
Perkembangan Peningkatan Kapasitas
(jumlah Penerima Manfaat Pendidikan/pelatihan)

No	Jenis pendidikan/pelatihan	Sebelum th 2013	Tahun 2013	Total database
1.	Pendidikan Kader Dasar	5.812	1.699	7.511
2.	Pendidikan Kader Menengah	128	0	128
3.	Pendidikan Kader Lanjut	39	0	39
4.	ToT Fasilitator Pendidikan Kader Dasar	0	31	31
5.	ToT Fasilitator Pengorganisasian	0	26	26
6.	Pelatihan Ketrampilan Politik Caleg Perempuan	0	180	180
7.	Ketrampilan Politik Caleg Perempuan	0	60	60
8.	ToT Fasilitator Caleg Perempuan	0	59	59
9.	ToT Fasilitator Pendidikan Pemilih	0	12	12
10.	Pelatihan Pengorganisasian			
11.	ToT Fasilitator Pendidikan Anti Korupsi	80	0	80

12.	Pendidikan Anti Korupsi		0	
13.	Pendidikan Gender & HAM bagi Perempuan yang dilacurkan		0	
14.	Pendidikan Advokasi	0	28	28

Tabel 2
Perkembangan Jumlah dan Jenis Modul
Yang diprouksi Koalisi Perempuan Indonesia

No	Jenis modul/sylabus	Tahun Penyusunan & Penerbitan	keterangan
1.	Pendidikan Kader Dasar	Tahun 2009	Dicetak & Diterbitkan
2.	Pendidikan Kader Menengah	Tahun 2009	Dicetak & Diterbitkan
3.	Pendidikan Kader Lanjut	Tahun 2009	Dicetak & Diterbitkan
4.	Pendidikan Politik	Tahun 2001	Untuk internal tidak diterbitkan
5.	Pendidikan Kepemimpinan Transformatif	Tahun 2002	Untuk internal tidak diterbitkan
6.	Pendidikan Gender & HAM untuk Pedila	Tahun 2011	Untuk internal tidak diterbitkan
7.	Pendidikan Gender Budget	Tahun 2003	Untuk internal tidak diterbitkan
8.	Pendidikan Anti Korupsi	Tahun 2012	Dicetak & Diterbitkan
9.	Pelatihan Ketrampilan Politik Caleg Perempuan	Tahun 2013	Dicetak & Diterbitkan
10.	Pelatihan Ketrampilan Politik Caleg Perempuan	Tahun 2013	Dicetak & Diterbitkan

11.	Pendidikan Pemilih	Tahun 2013	Dicetak & Diterbitkan
-----	--------------------	------------	-----------------------

3. Capaian Dukungan Program (Litbang SMI & TI , Keuangan & Kerumahtangaan)

- 1) Adanya laporan Penelitian tentang Akses Perempuan Terhadap Perlindungan Sosial yang dapat digunakan sebagai basis advokasi dan Pengorganisasian
- 2) Website KPI di akses oleh 27.403 . Pencarian di google , dengan kata kunci “ Perempuan “ , “koalisi perempuan “ “ perempuan di Indonesia “ diantara 94.700.000 pencarian KPI ada di halaman pertama
- 3) Pencetakan 9.468 KTA untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Tengah (cab Jepara), Aceh, Kutai Kartanegara, Sulawesi Utara, Maluku Utara , Bali , NTT dan NTB
- 4) Tersedianya dokumen organisasi dan berbagai sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- 5) Dimuatnya pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia di berbagai media cetak
- 6) Adanya tanggapan dari Pemerintah, DPR dan berbagai pihak melalui media terhadap pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia yang dimuat berbagai media cetak

4. Capaian Dukungan Kelembagaan (divisi Keuangan dan divisi Kerumahtangaan)

- 1) Tersedianya Perencanaan dan Pelaporan Keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, Fundraising dan melihat perkembangan organisasi serta untuk melaksanakan prinsip transparansi & akuntabilitas
- 2) Tersedianya perangkat kerja yang dapat memperlancar kerja-kerja program (kantor, listrik, air, computer, furniture, buku/perpustakaan)
- 3) Berjalannya tata kelola administrasi umum
- 4) Terdistribusinya dokumen legal organisasi, dokumen organisasi dan materi KIE kepada pengurus Wilayah, Cabang dan Balai Perempuan sehingga pengurus Wilayah, Cabang dan Balai Perempuan dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, dan menjalankan rencana kerja yang telah diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional 2013.

- 5) Terpenuhi hak-hak staff (gaji dan tunjangan, asuransi, cuti/libur/day off)